

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, kedudukan perempuan berada di bawah pengaruh laki-laki. Kadang perempuan dijadikan alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Misalnya perkawinan putri raja dengan seorang raja dari wilayah lain dipandang sebagai usaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ini menjadi bukti bahwa perempuan dipandang sebagai benda. Bukan hanya terbentur oleh kekuatan fisik yang lemah namun adat istiadat pun mengharuskan mereka patuh dan berada di belakang laki-laki. Perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap hidup. Kehidupan mereka lebih banyak berada di dalam rumah seperti "di dapur, di sumur dan di kasur".

Masuknya Belanda ke wilayah Nusantara tidak memberikan keluasaan bagi perempuan pada saat itu. Ini juga dibenarkan oleh pernyataan dari Lucia Juningsih (A. Budi Hartono dan Dadang Yulianto, 1997) bagaimana kedudukan perempuan pada masa kolonialisme Belanda :

Pada zaman penjajahan Belanda yang relatif lama, bukti terjadinya kekerasan seksual tampak dari lahirnya anak-anak *indo* (campuran Indonesia-Belanda) di luar nikah dan sebutan *nyai* merupakan lambang romantisme seksual yang memberikan kunci suksesnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Sebagian *nyai* menjadi simpanan bangsa Belanda karena takut atau terpaksa melayani kebutuhan seksual bangsa Belanda.

Sebagai pemegang kekuasaan di Hindia Belanda pada saat itu, para laki-laki Belanda memiliki pengaruh dan ancaman bagi masyarakat pribumi. Pada umumnya penduduk pribumi merasa ketakutan dan menuruti semua keinginan mereka. Sehingga pribumi merasa terpaksa dan merelakan putrinya untuk

dijadikan Istri simpanan para opsir Belanda. Kehidupan Nyai pada umumnya cukup baik dan diberi nafkah secara layak. Walaupun sebagian di antaranya merasa takut dan terpaksa melayani kebutuhan seksual bangsa Belanda.

Pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang, kedudukan perempuan tidak begitu saja lepas dari kekerasan seksual. Bahkan lebih buruk dari apa yang dirasakan oleh perempuan pada masa penjajahan Bangsa Belanda. Walaupun pendudukan Jepang di Indonesia relatif singkat, mereka melakukan perekrutan terhadap perempuan secara massal, yang dilakukan secara paksa untuk dijadikan pemuas nafsu tentara dan pegawai sipilnya. Pemerintah menyediakan tempat pelacuran khusus bagi para tentara Jepang yang berada di garis depan. Hal ini dilakukan agar para tentara Jepang tidak melakukan hubungan biologis secara sembarangan yang mengakibatkan tersebarnya penyakit kelamin.

Selama pendudukan Jepang, bukan hanya kekayaan alamnya saja yang dikuras habis, tetapi manusianya pun dimanfaatkan. Sehingga banyak korban berjatuhan, terutama mereka yang menjadi *Romusha* yaitu sebagai pekerja kasar. Mereka dibawa ke berbagai tempat yang strategis, seperti pertambangan dan perkebunan. Mereka bekerja tanpa istirahat dan tanpa diberi makan. Bila ada yang melawan akan dicambuk atau langsung dibunuh, baik laki-laki atau pun perempuan mengalami nasib yang sama.

Orang Jepang secara umum memandang perempuan sebagai pelayan yang akan memenuhi segala keinginannya. Oleh karena itu, para tentara Jepang kurang memperhatikan keadaan perempuan selama masa pendudukan di negara lain. Para

tentara Jepang hanya sibuk dengan urusan pertempuran di garis depan. Selain itu, mereka berperang sebagai bentuk pengabdian kepada kaisar.

Melihat sejarah Jepang, kedudukan perempuan dipandang hanya sebagai pelengkap hidup saja. Laki-laki dan perempuan seharusnya menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Kehidupan laki-laki di Jepang hanya berputar pada masalah pekerjaan dan gaya hidup seorang samurai yang lebih mengutamakan harga dirinya. Laki-laki Jepang memandang bahwa seks sekedar untuk memperoleh kesenangan semata. Sehingga banyak laki-laki yang mencari pelampiasan nafsunya dengan mengambil seorang gundik untuk menemaninya tanpa memikirkan istrinya di rumah. Kedudukan *Geisha* sebenarnya ditujukan kepada mereka yang memiliki keinginan untuk melampiaskan nafsu belaka. Banyak di antara mereka yang kurang peduli apa yang dirasakan oleh perempuan.

Sebaliknya posisi perempuan di Jepang sendiri nasibnya tidak begitu berbeda dengan perempuan di Nusantara terutama di Jawa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Den Hartog (A. Budi Hartono dan Dadang Yulianto, 1997: 66) :

... amat tampak bahwa posisi perempuan Jepang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan posisi perempuan Indonesia khususnya Jawa. Apa yang tampak adalah bahwa kaum perempuan bertempat tidak lebih sebagai 'benda' yang nasibnya ditentukan oleh laki-laki. Sementara itu, tampak suatu kesan yang kuat bahwa laki-laki Jepang bisa dengan mudah mengambil gundik, atau mengadakan suatu pesta dengan menghadirkan *Geisha*.

Oleh karena itu, kehidupan perempuan di Jepang atau pun di Indonesia terutama di Jawa memiliki kesamaan yaitu hanya dipandang sebagai benda yang nasibnya ditentukan oleh laki-laki. Seorang perempuan harus menurut perintah suami dan keluarganya. Mereka lebih sering berada di rumah menunggu suaminya

pulang dan menyiapkan segala kebutuhannya. Perempuan diharuskan untuk bertutur kata yang baik dan memberi hormat dengan bersujud kepada suaminya dan orang yang lebih tua. Tidak boleh berkeluh kesah dan menahan perasaan hatinya sendiri. Sehingga bagi mereka yang tidak dapat bertahan maka banyak yang bunuh diri.

Tatanan hubungan laki-laki dan perempuan di Jepang tersebut, diterapkan di berbagai negara jajahan Jepang. Pemerintah Jepang membangun asrama-asrama yang berisikan perempuan-perempuan pribumi bagi para tentaranya. Para perempuan pribumi dibawa, dipaksa dan ditempatkan dalam suatu ruangan khusus oleh tentara Jepang. Mereka diperlakukan semena-mena tanpa menggunakan perasaan. Para perempuan ini dianiaya baik secara fisik maupun psikis. Perempuan yang dijadikan alat oleh militer Jepang tersebut kemudian dikenal dengan istilah *jugun ianfu*.

Istilah *jugun ianfu* kalau diartikan secara harfiah menjadi *ju* = ikut, *gun* berarti = militer/balatentara, sedangkan *ian* = penghibur, dan *fu* = perempuan, dengan demikian arti keseluruhannya "perempuan penghibur yang ikut militer". Dapat dikatakan bahwa istilah *jugun ianfu* merupakan istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Asia Pasifik.

Perekrutan perempuan yang akan menjadi *jugun ianfu* yaitu dengan cara memberikan ancaman dan teror-teror, bentuk kekerasan serta dengan tipu daya. Kondisi masyarakat di Indonesia pada saat itu semua bentuk perekrutan dapat

mudah dilakukan. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dapat mempermudah militer Jepang dalam melakukan intimidasi. Janji akan diberikan pekerjaan dan mendapatkan uang, banyak para perempuan tertarik untuk ikut bersama militer Jepang.

Perekrutan para perempuan ini juga melibatkan orang dari pribumi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Pramoedya Ananta Toer : Dari bupati sampai lurah meneruskan propaganda *Sendenbu* (barisan Propaganda Jepang). Sebagai konsekuensinya, mereka sendiri harus memberi contoh dengan menyerahkan anaknya demi keselamatan jabatan dan pangkat. Mereka tak boleh hanya berpropaganda terhadap masyarakat, tetapi harus menjadi suri teladan. Hal ini berlaku bagi para pejabat pada kantor-kantor pemerintah lain. Dari sini kelak orang dapat mengerti mengapa banyak benar putri pejabat yang di angkut Jepang entah ke mana. (Pramoedya Ananta Toer, 2007: 10). Mereka melakukannya dengan terpaksa karena tidak ingin mendapat ancaman dari pihak militer Jepang. Ada pula yang tidak mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh pihak militer Jepang. Para pejabat hanya menerima perintah untuk merekrut perempuan. Tidak diberikan alasan yang cukup jelas, sehingga mereka hanya menuruti perintah tersebut. Selain itu, ada pula dari pihak militer Jepang yang mencari sendiri para perempuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhannya.

Setelah pendudukan Jepang di Indonesia berakhir, bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II di Eropa dan Dunia. Pendudukan Jepang di Indonesia masih menyisakan penderitaan bagi para perempuan yang pernah menjadi *jugun ianfu*. Penderitaan secara fisik dan psikis harus diterima seumur

hidup. Penderitaan yang dialami oleh mantan *jugun ianfu* kurang mendapat dari pemerintah. Pemerintah lebih sibuk menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang. Terutama hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, sehingga upaya masyarakat atau pun korban *jugun ianfu* itu sendiri untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia mengalami hambatan.

Pemerintah tidak memiliki keinginan untuk membantu para korban pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbeda dengan sikap pemerintah dari negara-negara lain di Asia, yang pernah menjadi korban kekejaman pendudukan Jepang. Pemerintahnya begitu memperhatikan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakatnya yang pernah menjadi korban pada masa pendudukan Jepang di negaranya. Kemudian meminta kepada pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan kepada masyarakatnya di masa lalu, terutama kepada para korban *jugun ianfu*. Sikap pemerintah Indonesia ini tentunya mengecewakan bagi para korban *jugun ianfu*. Para *jugun ianfu* ini merasa berjuang sendirian tanpa di dampingi oleh pemerintahnya.

Segala keterbatasan yang dimiliki oleh para mantan *jugun ianfu* ini untuk melanjutkan misinya menuntut keadilan kepada pemerintah Jepang walaupun tanpa dukungan pemerintah. Ternyata hal ini berimbas pada masalah sumber-sumber dan informasi mengenai *jugun ianfu* itu sendiri. Terutama di masa sekarang, sumber tersebut menjadi sangat sedikit dan terbatas. Para mantan *jugun ianfu* juga sedikit demi sedikit semakin berkurang karena faktor usia. Walaupun

dengan keterbatasan sumber dan informasi tersebut, penulis tertarik dan berusaha untuk mengungkap kembali dengan melakukan penelitian mengenai *jugun ianfu* di Indonesia. Lebih lanjut sejarah tentang perempuan di Indonesia masih sangat terbatas.

Selama ini dalam penelitian sejarah selalu identik dengan konflik dan perang, lebih banyak menghadirkan intrik politik dan kepentingan ekonomi. Selain itu, sejarah selalu berkaitan erat antara kekuatan dan kekuasaan yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Mereka merupakan bagian yang penting dalam perkembangan sejarah pada umumnya. Sejarah di Indonesia pun lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Informasi sejarah tentang perempuan begitu terbatas, meskipun ada jumlahnya cukup sedikit.

Perempuan juga merupakan bagian dari sejarah yang terjadi, tetapi posisi perempuan hanya menjadi orang kedua setelah laki-laki. Perang dan perempuan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seringkali perempuan yang menjadi penentu hasil akhir dari sebuah perang. Perempuan seringkali dijadikan alat karena kelemahan dan fisik mereka yang tidak sebanding dengan laki-laki. Posisi perempuan digunakan sebagai pion dalam perang, mereka sering dijadikan umpan untuk mengelabui musuh-musuhnya. Ketidakberdayaannya perempuan ternyata memiliki peran penting dalam suatu peristiwa sejarah. Pengaruhnya begitu terasa baik itu secara langsung ataupun tidak.

Oleh karena itu, perempuan menjadi sebuah tema yang menarik untuk dijadikan objek penelitian. Keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan memiliki ketertarikan tersendiri. Namun di balik itu semua terdapat kekurangan dalam

memperoleh informasi tentang sejarah perempuan di Indonesia. Sejarah tentang perempuan cukup terbatas dan sedikit sekali jumlahnya. Hal ini wajar bila melihat sejarah di Indonesia lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Guna menggali informasi sejarah perempuan yang selama ini kurang dibahas.

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan di atas tadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih banyak mengenai bagaimana sistem *jugun ianfu* ini berlangsung di Indonesia serta bagaimana keadaan sosial psikologi perempuan selama berada dalam cengkraman Pemerintah Jepang di Indonesia. Ketertarikan tersebut penulis tuliskan dalam skripsi yang berjudul **“*Jugun Ianfu*, Eksploitasi Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Pada saat mengkaji permasalahan mengenai “*Jugun Ianfu*, Eksploitasi Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)”, dapat ditemukan berbagai permasalahan yang banyak di dalamnya. Untuk itu penulis membuat batasan-batasan permasalahan agar penelitian bisa lebih mendalam.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi penduduk Indonesia pada masa Pendudukan Jepang?
2. Bagaimana sistem *jugun ianfu* ini berjalan di Indonesia?

3. Bagaimana nasib bekas *jugun ianfu* setelah berakhirnya Pendudukan Jepang di Indonesia?
4. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh keluarga korban terhadap anggota keluarganya yang pernah menjadi *jugun ianfu*?
5. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dan sikap pemerintah Jepang terhadap kasus *jugun ianfu* di Indonesia?
6. Bagaimana pandangan gender terhadap kasus *jugun ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan kondisi sosial-ekonomi penduduk Indonesia pada masa Pendudukan Jepang.
2. Mengungkapkan bagaimana sebenarnya sistem *jugun ianfu* ini berjalan di Indonesia.
3. Menjelaskan bekas *jugun ianfu* setelah berakhirnya Pendudukan Jepang di Indonesia.
4. Menjelaskan dampak yang dirasakan oleh keluarga korban terhadap anggota keluarganya yang pernah menjadi *jugun ianfu*.
5. Menjelaskan sikap pemerintah Indonesia dan sikap pemerintah Jepang terhadap kasus *jugun ianfu* di Indonesia.

6. Menjelaskan pandangan gender terhadap kasus *jugun ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

D. Metodologi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan, digunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian. Metode historis yaitu suatu metode yang didasarkan terhadap analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangannya, sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah dan dari penyelidikan tersebut disusun asas-asas umum yang dipergunakan (Sjachran Basah, 1994 : 65).

Selain itu, Metode historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini di tuntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objek untuk memahami masa lampau. Selain itu, metode historis juga mengandung pengertian sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Penulis juga menggunakan metode wawancara dalam memperoleh informasi tentang para mantan *jugun ianfu*.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian, seperti yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 48-50) adalah sebagai berikut:

1. Heuristik, yaitu tahapan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dipilih. Cara yang dilakukan

yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber, sumber tersebut berupa buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selama ini penulis mencari sumber berupa buku-buku, artikel dan yang lainnya dari Perpustakaan yang ada di Bandung hingga ke Jakarta. Selain itu juga penulis sudah melakukan kontak dengan salah satu lembaga bantuan hukum yang pernah membantu para korban *jugun ianfu*. Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan direktur LBH APIK Jakarta yang berfungsi sebagai *Expert Opinion* dalam menanggapi masalah tentang *jugun ianfu*.

2. Kritik, yaitu tahap menganalisis secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah didapat pada tahap heuristik. Kritik dilakukan pada sumber primer maupun sumber sekunder, sehingga diperoleh fakta sejarah yang otentik. Ada dua macam kritik yang dilakukan pada tahap ini yaitu kritik eksternal dan kritik internal.
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Pada tahap ini penulis menginterpretasikan fakta-fakta yang telah diperoleh, setelah fakta tersebut dikritik terlebih dahulu keotentikannya. Tahapan ini diharapkan mampu menjawab terhadap permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.
4. Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahapan ini, setelah sumber didapat, dikritik serta diinterpretasikan, kemudian penulis menyusunnya dalam bentuk tulisan. Penulisan tersebut harus memenuhi tata bahasa penulisan yang baik

dan benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Adapun untuk teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah studi literatur. Dalam studi literatur, penulis mencari dan menelaah sumber-sumber tertulis yang ada berupa buku, artikel, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan “*Jugun Ianfu*, Eksploitasi Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)”.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut :

Bab I yang merupakan Pendahuluan. Pada bab ini penulis mengungkapkan latar belakang masalah mengapa penulis memilih tema “*jugun ianfu*, Eksploitasi Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)”. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan dan batasan masalah yang bertujuan agar penelitian tidak melenceng dari permasalahan yang seharusnya. Bab ini juga memuat tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini, penulis memaparkan mengenai sumber buku yang menjadi buku rujukan utama dalam penulisan ini. Selain itu dipaparkan pula sumber-sumber lain yang digunakan sebagai referensi dan dianggap relevan dengan permasalahan kajian. Penulis mengkaitkan apa yang ada dalam buku tersebut dengan permasalahan yang penulis ajukan yaitu “*Jugun*

